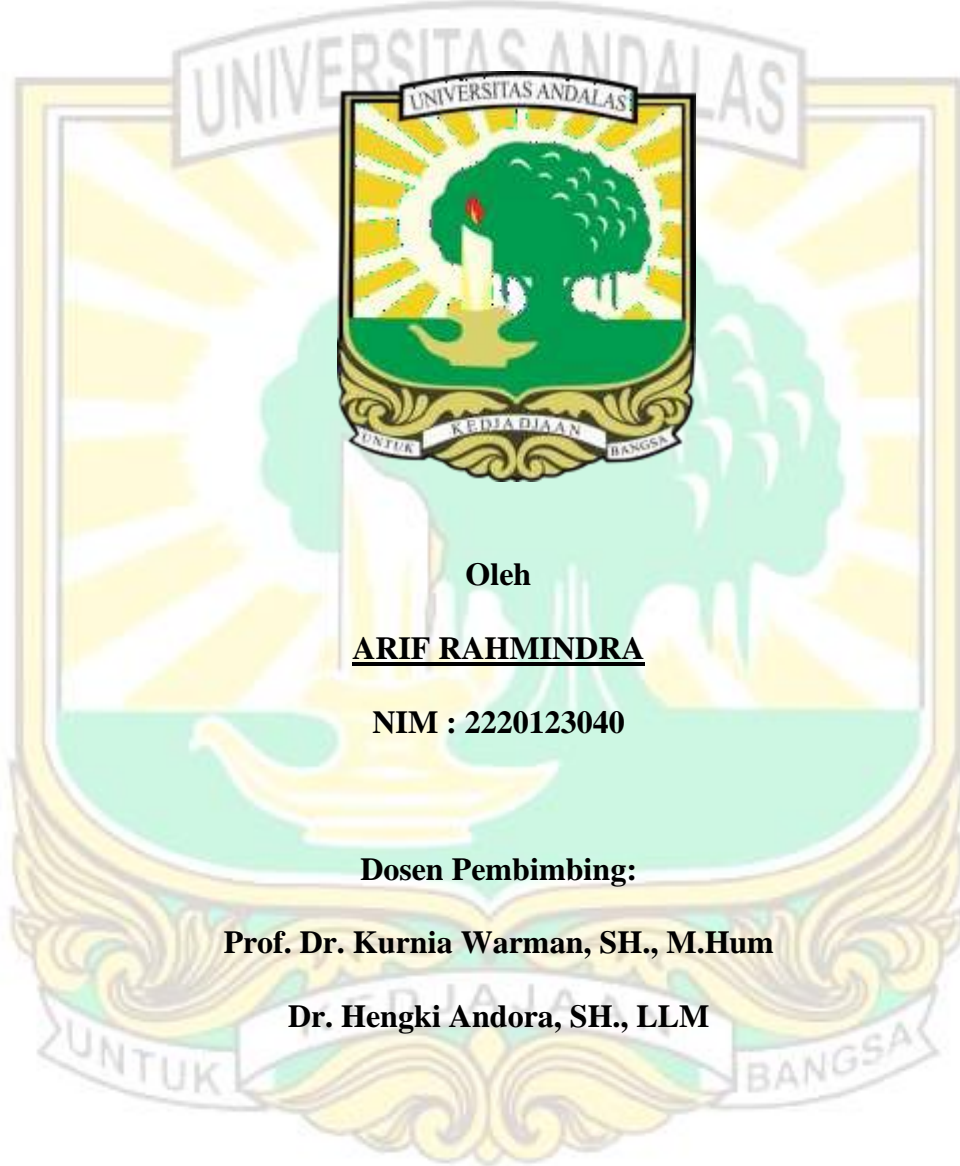


**PENDAFTARAN TANAH PEMERINTAH SECARA ELEKTRONIK
DI KOTA BUKITTINGGI**

Tesis

*Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Magister
Kenotariatan*



Oleh

ARIF RAHMINDRA

NIM : 2220123040

Dosen Pembimbing:

Prof. Dr. Kurnia Warman, SH., M.Hum

Dr. Hengki Andora, SH., LLM

**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2024**

PENDAFTARAN TANAH PEMERINTAH SECARA ELEKTRONIK DI KOTA BUKITTINGGI

(Arif Rahmindra, 2220123040, Fakultas Hukum Unand, 2024, 136 Halaman)

Pembimbing : Prof. Dr. Kurnia Warman, SH., M.Hum Dr. Hengki Andora, SH., LLM

ABSTRAK

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional menjadi institusi yang berstandar dunia dan meningkatkan kualitas pelayanan publik serta memberikan perlindungan dan jaminan keamanan data, perlu menerapkan teknologi informasi dan komunikasi dalam kegiatan pendaftaran tanah. Pendaftaran tanah secara elektronik merupakan suatu cara untuk memanfaatkan kemajuan teknologi. Sebagai teknologi, elektronisasi bertujuan menghadirkan keuntungan seperti kemudahan, dan efisiensi. Pada tanggal 29 April 2024 Kota Bukittinggi menyelenggarakan alih media serta pendaftaran tanah pemerintah secara elektronik, namun pada penerapannya masih ada beberapa permasalahan yang ditemui oleh penulis dalam penelitian ke kantor Pertanahan Kota Bukittinggi seperti aplikasi error, data teknis dan data yuridis belum lengkap dan berbagai permasalahan lainnya. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu: 1) Bagaimanakah Pengalihan Media Sertipikat Tanah Pemerintah manual menjadi sertipikat elektronik di kantor Pertanahan kota Bukittinggi. 2) Bagaimanakah Pendaftaran Tanah Pemerintah secara elektronik di kantor Pertanahan Kota Bukittinggi. 3) Bagaimanakah Kepastian hukum penguasaan Tanah Pemerintah dalam bentuk Sertipikat Elektronik. Penelitian ini menggunakan Metode Penelitian Yuridis Empiris, menggunakan data primer dan data sekunder. teknik pengumpulan data berupa wawancara dengan pihak yang berkaitan dengan penelitian ini. Alih media sertipikat tanah di Bukittinggi terhambat oleh masalah teknis, data, akses teknologi dan keamanan IT. Solusinya adalah pelatihan SDM, digitalisasi data, percepatan PTSL, edukasi teknologi dan penguatan keamanan IT. Efektivitas Sertipikat elektronik juga bergantung pada pemahaman hukum dan kepatuhan terhadap aturan hukum. Dalam konteks mekanisme pendaftaran tanah aset daerah, apabila tanah aset daerah telah ditetapkan statusnya oleh DJKN (Direktorat Jendral Kekayaan Negara) maka pemerintah daerah mendaftarkan tanah aset daerah tersebut secara elektronik kepada Kantor Pertanahan Bukittinggi melalui aplikasi yang disediakan oleh kementerian. Sertipikat tanah elektronik sebagai bukti kepemilikan elektronik diakui oleh UU ITE khususnya diatur dalam pasal 6. Dari sisi hukum persoalan pembuktian sertipikat tanah elektronik tidak menjadi masalah. Dari segi validitas dan kepastian hukum tidak ada persoalan apalagi juga sudah dikuatkan dalam Pasal 84 ayat 3 dan 4 PP nomor 18 tahun 2021.

Kata Kunci : Alih Media Sertipikat, Pendaftaran Tanah Elektronik, Kepastian Hukum Penguasaan Tanah Pemerintah secara elektronik

ELECTRONIC GOVERNMENT LAND REGISTRATION IN BUKITTINGGI CITY

(Arif Rahmindra, 2220123040, Faculty of Law Unand, 2024, 136 Pages)

Supervisor: Prof. Dr. Kurnia Warman, SH., M.Hum Dr. Hengki Andora, SH., LLM

ABSTRACT

In order to realize the vision and mission of the Ministry of Agrarian and Spatial Planning/National Land Agency to become a world-class institution and improve the quality of public services, as well as providing protection and security for data, it is necessary to implement information and communication technology in land registration activities. Electronic land registration is a way to utilize technological advancements. As a technology, electronic registration aims to provide benefits such as ease and efficiency. On April 29, 2024, Bukittinggi City conducted the transfer of media and electronic registration of government land. However, in its implementation, several problems were encountered by the researcher in a study at the Bukittinggi City Land Office, such as application errors, incomplete technical and legal data, and various other problems. The research problems in this study are: 1) How is the transfer of media from manual government land certificates to electronic certificates at the Bukittinggi City Land Office? 2) How is the electronic registration of government land at the Bukittinggi City Land Office? 3) How is the legal certainty of government land ownership in the form of electronic certificates? This research uses the Empirical Legal Research Method, using primary and secondary data. The data collection technique is in the form of interviews with parties related to this research. The transfer of land certificates in Bukittinggi is hindered by technical problems, data, technology access, and IT security. The solutions are human resource development, data digitalization, accelerated PTSL (Systematic Land Registration), technology education, and strengthening IT security. The effectiveness of electronic certificates also depends on the understanding of the law and compliance with legal regulations. In the context of the mechanism for registering regional government assets, if the status of regional government land has been determined by the DJKN (Directorate General of State Assets), then the regional government registers the regional government land electronically to the Bukittinggi Land Office through the application provided by the ministry. Electronic land certificates as electronic proof of ownership are recognized by the ITE Law, specifically regulated in Article 6. From a legal standpoint, the issue of proving electronic land certificates is not a problem. In terms of validity and legal certainty, there is no problem, especially since it has been strengthened in Article 84 paragraphs 3 and 4 of Government Regulation number 18 of 2021.

Keywords: Media Transfer of Certificates, Electronic Land Registration, Legal Certainty of Government Land Ownership in Electronic Form